



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
**SUB UNIT KERJA** : BIRO PERENCANAAN PENGEMBANGAN USAHA, PELAYANAN DAN PENTARIFAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ASEP LILI HOLILULLOH
2. Jabatan : KEPALA BIRO PERENCANAAN PENGEMBANGAN USAHA, PELAYANAN DAN PENTARIFAN
3. NHK : 518737

**II. DATA HARTA**

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.350.000.000
1. Tanah Seluas 138 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
  2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
  3. Tanah Seluas 320 m2 di SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
  4. Tanah Seluas 603 m2 di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
  5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/40 m2 di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 252.000.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
  2. MOBIL, HONDA MDD4 1.5 E M-CVT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
  3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 67.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	147.818.086
F. HARTA LAINNYA	Rp.	129.856.750
Sub Total	Rp.	1.946.674.836
III. HUTANG	Rp.	254.836.633
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.691.838.203

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.